

LEMBUR

Lembaran Buruh
 Surat kabar seputar buruh oleh TURC

SOROTAN

May Day 2026: Mengakhiri Ilusi Globalisasi Murah

Ketika Aksi Demokrasi Menjadi Dekorasi: Bagaimana Negara Menjinakkan Jalanan?

Para Penyihir Abad Ini: Perempuan, Pekerjaan, dan Beban Kerja Tak Kasat Mata

Sunyi di Pinggir Perkebunan: Potret Buruh Sawit dalam Bayang-Bayang May Day

Tren Kasus Ketenagakerjaan yang Ditangani TURC

Refleksi Kritis: May Day – Perlawanan, Ritual, atau Banding?

Editors: Keyshia & Fariz



May Day 2026: Mengakhiri Ilusi Globalisasi Murah

Oleh: Surya Tjandra, Direktur Eksekutif TURC



May Day tahun ini berlangsung di tengah perubahan besar dalam ekonomi global. Krisis bertubi-tubi—pandemi, konflik geopolitik, inflasi, dan krisis iklim—telah membongkar satu hal mendasar: **globalisasi tidak pernah netral**. Ia dibangun di atas distribusi risiko dan keuntungan yang timpang. Buruh menjadi pihak yang paling sering menanggung beban, sementara pemilik modal tetap mampu mengakumulasi keuntungan, bahkan di masa krisis.

Selama ini, integrasi Indonesia ke dalam rantai pasok global diposisikan sebagai strategi pembangunan: menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong ekspor. Namun, realitas di lapangan menunjukkan kontradiksi yang tajam. Model ini bertumpu pada keunggulan

upah murah dan fleksibilitas tenaga kerja. Ketika ekonomi global tumbuh, buruh hanya menikmati sebagian kecil manfaat. Ketika krisis datang, mereka menjadi “katup pengaman” – yang pertama dikorbankan melalui PHK, pemotongan upah, atau kontrak kerja yang semakin tidak pasti.

Masalahnya tidak berhenti pada struktur global. Di tingkat domestik, arah kebijakan ketenagakerjaan dalam beberapa tahun terakhir justru memperdalam kerentanan tersebut. Dengan dalih meningkatkan daya saing investasi, fleksibilitas pasar kerja diperluas, sementara perlindungan buruh relatif stagnan. Hubungan kerja tidak tetap, outsourcing, dan kontrak jangka pendek menjadi norma baru. Dalam praktiknya, ini bukan sekadar fleksibilitas, melainkan institusionalisasi ketidakpastian kerja.

Pada saat yang sama, inflasi menggerus daya beli. Kenaikan harga pangan dan energi membuat upah riil buruh tidak mampu mengejar biaya hidup. Bagi banyak pekerja, isu “upah layak” berubah menjadi soal bertahan hidup sehari-hari. Sistem jaminan sosial memang berkembang, tetapi belum cukup kuat untuk menjadi bantalan efektif, terutama bagi pekerja informal dan mereka yang berada di luar hubungan kerja formal.

Namun, menyederhanakan persoalan sebagai kegagalan kebijakan domestik saja juga keliru. Negara berada dalam tekanan kompetisi global yang nyata. Relokasi industri dari negara lain membuka peluang, tetapi juga menciptakan insentif untuk menekan biaya tenaga kerja. Tanpa strategi industrial yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah, Indonesia berisiko terjebak dalam “*race to the bottom*” [perlombaan menuju standar perlindungan buruh terendah] – di mana hak buruh dikorbankan demi investasi jangka pendek.

Di sinilah letak persoalan utamanya: **globalisasi yang dijalankan saat ini tidak mengoreksi ketimpangan, melainkan mereproduksinya.** Nilai tambah terkonsentrasi di puncak rantai pasok, sementara negara-negara produsen seperti Indonesia bersaing dalam menekan biaya. Tanpa intervensi, tidak ada mekanisme otomatis yang akan memperbaiki distribusi ini.

Perubahan teknologi dan tuntutan transisi hijau semakin memperumit situasi. Digitalisasi menciptakan bentuk kerja baru, tetapi seringkali di luar jangkauan perlindungan hukum. Pekerja platform, misalnya, ditempatkan sebagai “mitra”, bukan pekerja, sehingga tidak berhak atas upah minimum, jaminan sosial, atau perlindungan kerja.

Sementara itu, transisi menuju ekonomi rendah karbon membawa risiko kehilangan pekerjaan di sektor tertentu, tanpa jaminan bahwa pekerjaan baru yang tercipta akan lebih baik.

Dalam konteks Indonesia, ini bukan sekadar isu masa depan—ini sudah terjadi. Ekspansi industri berbasis sumber daya alam dan hilirisasi membuka peluang ekonomi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang kondisi kerja, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Tanpa kerangka “transisi yang adil” (*just transition*), perubahan ini berpotensi mengulang pola lama: keuntungan terkonsentrasi, risiko ditanggung buruh.

May Day 2026 harus menjadi titik balik untuk mengakhiri ilusi bahwa pertumbuhan ekonomi otomatis akan menetes ke bawah. Tanpa perubahan struktur, yang terjadi justru sebaliknya: ketimpangan semakin dalam, dan buruh semakin terpinggirkan.

Apa yang perlu dilakukan?

- **Pertama**, mengakhiri fragmentasi gerakan buruh. Selama serikat buruh terpecah, posisi tawar akan selalu lemah. Konsolidasi bukan pilihan idealis, tetapi kebutuhan strategis untuk menghadapi kekuatan modal yang semakin terorganisir secara global.
- **Kedua**, menggeser strategi dari reaktif ke struktural. Perjuangan tidak cukup berhenti pada tuntutan upah atau penolakan kebijakan tertentu. Gerakan buruh perlu masuk ke isu yang lebih dalam: bagaimana rantai pasok global bekerja, bagaimana nilai tambah didistribusikan, dan bagaimana kebijakan industri dibentuk.
- **Ketiga**, menguasai data dan pengetahuan. Dalam ekonomi global, kekuatan tawar tidak hanya ditentukan oleh jumlah massa, tetapi juga oleh kemampuan membaca struktur ekonomi. Tanpa data, buruh akan selalu bernegosiasi dalam posisi lemah.
- **Keempat**, membangun aliansi lintas isu. Perjuangan buruh tidak bisa dipisahkan dari isu lingkungan, gender, dan keadilan sosial. Transisi hijau, misalnya, hanya akan adil jika melibatkan buruh sebagai aktor utama, bukan korban.
- **Kelima**, mendorong negara keluar dari logika biaya murah. Indonesia tidak bisa selamanya bersaing dengan menekan upah. Strategi pembangunan harus beralih ke peningkatan produktivitas, teknologi, dan kualitas pekerjaan. Ini bukan hanya kepentingan buruh, tetapi juga prasyarat pembangunan jangka panjang.

Akhirnya, May Day bukan sekadar peringatan, tetapi momen untuk menegaskan kembali arah perjuangan. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, satu hal tetap jelas: tanpa kekuatan kolektif, buruh akan terus menjadi pihak yang menanggung risiko tanpa menikmati hasil.

Pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan diperlukan, tetapi siapa yang akan mendorongnya. Jika gerakan buruh tidak mengambil peran itu, maka arah globalisasi akan terus ditentukan oleh mereka yang diuntungkan oleh ketimpangan. May Day 2026 harus menjadi awal dari perubahan itu.



Catatan dari Hari Buruh yang Sunyi

Oleh: Anonymous

Ada rasa yang mengganjal dan membuat gelisah di Hari Buruh kemarin. Di tengah ribuan orang yang berkumpul, aku justru merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Massa berseragam May Day tanpa identitas serikat yang jelas. Ramai, tapi seperti terasa kosong.

Sejak kapan Hari Buruh menjadi begitu sunyi dari tuntutan?

Kemana hilangnya teriakan tuntutan yang biasanya lantang menggema? Kemana semangat melawan penindasan yang dulu begitu hidup di ruang-ruang seperti ini?

Belum lagi pemandangan desak-desakan demi antrean sembako. Di satu sisi, aku tidak bisa menyalahkan kebutuhan itu, terlebih di tengah himpitan ekonomi hari ini. Tapi di sisi lain, jangan lagi beri ruang pada stigma bahwa kami akan tunduk hanya karena perut kami diisi. Makna kerja yang bermartabat tidak sesederhana itu.

Kehadiran di Monas, bagi sebagian orang, mungkin dimaknai sebagai strategi. Datang bukan untuk tunduk, tapi untuk mengawasi, untuk mencatat, untuk mengingat janji-janji yang suatu hari harus ditagih kalau-kalau mereka ingkar janji (lagi). Tapi kita juga perlu jujur. Ketika ruang perlawanan mulai diisi oleh simbol tanpa substansi, ketika kritik digantikan oleh seremoni, ada yang sedang bergeser secara perlahan. Dan pergeseran itu tidak netral.

Kemarin, sebagian dari kami memilih untuk tetap bersuara di ruang lain, di ruang yang semakin sempit, semakin dipinggirkan. Tentu bukan pilihan yang mudah, tapi mungkin memang di situlah hari ini perlawanan harus dirawat.

Perjuangan ini belum selesai. Dan tidak akan selesai hanya dengan hadir. Jangan menyerah, kawan. Mungkin makna Hari Buruh telah bergeser bagi sebagian orang, tapi perjuangan ini belum selesai. Karena kerja layak dan hidup layak tidak akan pernah diberikan. Ia harus terus diperjuangkan bahkan ketika ruangnya dipersempit dan suaranya kian diredam.

All in all, jabat erat dan selamat hari buruh sedunia. *Cheers up high to all workers of the world, unite, unite, unite!!!* 🍻

Ketika Aksi Demokrasi Menjadi Dekorasi: *Bagaimana Negara Menjinakkan Jalanan?*

Oleh: Andre ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Hari Buruh Internasional pada hakikatnya lahir sebagai bentuk protes kelas pekerja terhadap ketidakadilan sistemik dan kekuasaan politik. Sejarahnya bermula dari perjuangan buruh di Amerika Serikat pada abad ke-19 yang menuntut jam kerja wajar dan perbaikan kondisi kerja, suatu tuntutan yang akhirnya diperingati setiap 1 Mei di seluruh dunia.



Namun, ketika ideologi perjuangan bertemu dengan kekuasaan negara, makna politik May Day berubah **dari ancaman menjadi ritual**. Pada tahap awal, negara menggunakan represi keras atau pembatasan ruang publik untuk meredam tekanan turun ke jalan. Seiring waktu, strategi itu bergeser ke bentuk yang lebih terstruktur dan bisa diatur.

Perubahan strategi ini mencerminkan realitas bahwa jalanan bukan hanya ruang fisik untuk protes, melainkan juga medan konflik simbolik antara kekuasaan negara dan aspirasi kelas pekerja. Dalam konteks Indonesia, ada pola konsisten: negara mengatur, mengelola, serta membatasi aktivitas massa, sehingga protes bisa berlangsung tertib, tapi sering kali kehilangan daya guncangnya.

Masa Kolonial dan Awal Republik: Buruh sebagai Ancaman Politik

Peringatan May Day di Indonesia berakar jauh sebelum kemerdekaan. Catatan sejarah menyebutkan bahwa pada 1 Mei 1918, buruh di Hindia Belanda pertama kali memperingati Hari Buruh untuk menuntut upah layak dan kondisi kerja manusiawi.

Gerakan ini dipengaruhi oleh tokoh-tokoh sosialis dan organisasi buruh yang mulai menyuarakan tuntutan sosial di bawah kekuasaan kolonial. Tuntutan ini membuat gerakan buruh dipandang sebagai ancaman politik terhadap tatanan kolonial, terutama karena mereka mengadvokasi solidaritas kelas dan hak pekerja secara kolektif.

Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintahan republik awal mengizinkan peringatan May Day dan bahkan mengatur hak pekerja dalam UU No. 12 Tahun 1948, termasuk hak untuk tidak bekerja pada 1 Mei. Ini menunjukkan bahwa dalam fase awal republik, negara melihat gerakan buruh sebagai bagian dari negosiasi sosial yang sah, bukan ancaman subversif.

Orde Baru: Depolitisasi dan Pengendalian Total

Era Soeharto membawa perubahan drastis terhadap posisi gerakan buruh. May Day yang sebelumnya diperingati kembali setelah kemerdekaan, dilarang keras pada masa Orde Baru karena dianggap identik dengan komunisme dan subversi setelah peristiwa G30S/PKI.

Dalam rezim ini, negara tidak sekadar melarang aksi massa, tetapi juga mengkonsolidasikan organisasi buruh ke dalam organisasi tunggal yang diberikan izin. Hal ini membuat suara dan tuntutan buruh dipotong menjadi bentuk yang lebih terkontrol oleh negara, sehingga ruang oposisi kelas pekerja dipersempit drastis. Depolitisasi ini merupakan strategi yang lebih halus daripada represi fisik yang bukan hanya larangan, tetapi pembatasan struktural terhadap organisasi dan suara kritis.

Reformasi: Jalanan Terbuka, Tapi Dikawal

Kejatuhan Orde Baru membuka kembali ruang aksi publik, termasuk perayaan May Day. Selepas 1998, demonstrasi buruh kembali marak di berbagai kota besar Indonesia. Momentum ini menjadi penanda bahwa setelah era otoritarian, jalanan kembali menjadi arena tuntutan sosial.

Para buruh menuntut berbagai hal mulai dari upah layak, penolakan revisi undang-undang yang merugikan, hingga jaminan sosial. Pada 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 1 Mei sebagai hari libur nasional, yang mulai berlaku pada 2014. Ini resmi mengakui kontribusi buruh terhadap pembangunan bangsa.

Namun pengakuan ini datang bersamaan dengan kerangka kontrol: demonstrasi boleh dilakukan, tetapi dalam koridor perizinan, pengawasan aparat, dan pengaturan massa yang ketat. Negara membuka jalanan, tetapi sekaligus mengawasi tiap langkahnya.



Dari Perlawanan ke Perayaan: Ritual Demokrasi yang Hambar

Dalam dua dekade terakhir, May Day di Indonesia telah berubah bentuk dari protes yang mengguncang menjadi perayaan tahunan yang terstandarisasi. Massa buruh berkumpul di titik-titik strategis, menyampaikan orasi, tapi seringkali tirai pengamanan polisi dan batasan waktu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aksi itu sendiri. Laporan media menunjukkan bahwa aksi May Day sering ditutup dengan hiburan, konser musik, atau seremonial besar ketimbang tekanan politik yang tajam terhadap kebijakan negara.

Peringatan ini menjadi semacam ritual demokrasi yang ditunggu setiap tahun, tetapi sering dianggap hambar karena tuntutan fundamentalnya jarang berubah signifikan dari tahun ke tahun: upah layak, perlindungan kerja, perlindungan sosial. Sementara respons negara cenderung berupa dialog administratif atau pernyataan dukungan tanpa perubahan struktural mendalam.

Ketika Protes Dikelola, Bukan Didengar

Fenomena paling menonjol dari evolusi May Day adalah bagaimana negara mengelola protes sebagai acara yang sah namun dapat diatur. Dalam kondisi demokrasi prosedural, demonstrasi dilindungi secara hukum, tetapi seringkali diterjemahkan sebagai peringatan simbolik, bukan tekanan politik efektif. Negara menempatkan aparat untuk mengatur jalur aksi, waktu berkumpul, dan perizinan sehingga meskipun aksi berjalan damai, efek politisnya tereduksi menjadi esensi administratif.

Strategi jenis ini berbeda dengan represi kasar, yang justru menggunakan regulasi formal untuk menjinakkan tuntutan. Negara modern tidak perlu melarang protes, cukup mengaturnya sehingga eksplorasi konflik kepentingan berhenti pada ritual, bukan negosiasi kekuasaan.

Sebagai contoh, meskipun ada laporan rally besar-besaran pada May Day 2025 di Jakarta dengan kehadiran pejabat negara, termasuk Presiden, bentuknya lebih ceremonial daripada ajang tekanan langsung terhadap kebijakan industrial atau ketenagakerjaan.

Akhirnya, protes bisa berubah jadi sekadar formalitas yang aman dan bisa ditebak. Suara buruh tetap terdengar, tapi tidak lagi cukup kuat untuk mengguncang kebijakan. Negara terlihat memberi ruang, padahal yang terjadi hanya pengendalian. Kalau terus begini, May Day bukan lagi alat perjuangan, tapi sekadar panggung yang rapi dan ramai, tapi tidak benar-benar mengubah apa pun.

Masa Depan May Day

Ke depan, May Day akan terus menjadi cermin dari hubungan antara negara, kelas pekerja, dan demokrasi. Di satu sisi, pengakuan hukum dan libur nasional memberi ruang simbolik bagi buruh. Di sisi lain, struktur kekuasaan dan kebijakan publik yang menentukan nasib pekerja masih sering berada di luar medan aksi jalanan. Apakah May Day dapat kembali menjadi momentum politis yang mengguncang, bukan sekadar perayaan tahunan? Atau akankah ia tetap menjadi ritual demokrasi yang stabil namun kurang berpengaruh terhadap perubahan struktural?

Sejauh ini, bukti empiris menunjukkan bahwa negara telah berhasil mengubah protes menjadi acara yang terorganisir dan relatif terkendali, tanpa menghapus aspirasi buruh, tetapi mengendalikannya dalam batas-batas tertentu. Selama ketimpangan sosial dan tantangan kerja tetap ada, jalanan tetap menyimpan potensi politisnya sendiri, mungkin bukan sebagai ancaman langsung, tetapi sebagai panggung kritik kolektif dalam kerangka demokrasi yang dikelola.

May Day tidak boleh lagi sekadar seremoni tahunan yang kehilangan taring. Ini harus jadi momentum **tekanan nyata terhadap pemerintah dan korporasi yang masih abai pada kesejahteraan buruh**. Di tengah gelombang digitalisasi dan gig economy, pekerja tidak boleh terus jadi korban sistem yang fleksibel bagi perusahaan, tapi rapuh bagi mereka. Jika tidak ada keberanian untuk menuntut perubahan, maka masa depan May Day hanya akan jadi simbol kosong tanpa dampak nyata.



Para Penyihir Abad Ini: Perempuan, Pekerjaan, dan Beban Kerja Tak Kasat Mata

Oleh: Ara



Dalam dunia profesional, pekerja yang baik digambarkan sebagai sosok yang efisien, luwes, cerdas secara emosional dan dapat diandalkan. Berhadapan dengan target KPI, deadlines, dan tuntutan untuk terus berkembang mengikuti pasar dan teknologi merupakan bagian dari tantangan yang dihadapi setiap pekerja. Hanya saja, untuk sebagian kelompok, shift tidak selesai ketika jam kantor selesai. Ada yang pulang untuk memulai shift baru dengan beban emosional bertingkat, tanpa upah, tanpa pengakuan, namun telah menjadi ekspektasi dan harus sempurna di dalam perannya.

Inilah paradox dunia kerja modern bagi perempuan. Masuknya perempuan di ranah formal ekonomi tidak mengurangi ekspektasi sosial terhadap perannya di lingkup domestik. Dan bagaikan memiliki kekuatan sihir, mereka harus bisa menjalankan dua peran tersebut secara sempurna. “Penyihir” abad ini tidak lagi takut akan persekusi masyarakat jika kekuatannya ketahuan, tetapi takut jika kekuatan sihir mereka tidak cukup untuk menyediakan waktu, tenaga, dan energi untuk keluarga dan pekerjaan dan kecacatannya terendus oleh publik. Sepertinya, di periode waktu manapun, para penyihir akan tetap menghadapi amukan publik akibat tidak memenuhi standar sebagai perempuan yang seharusnya.

Sejarah yang Tidak Pernah Hilang

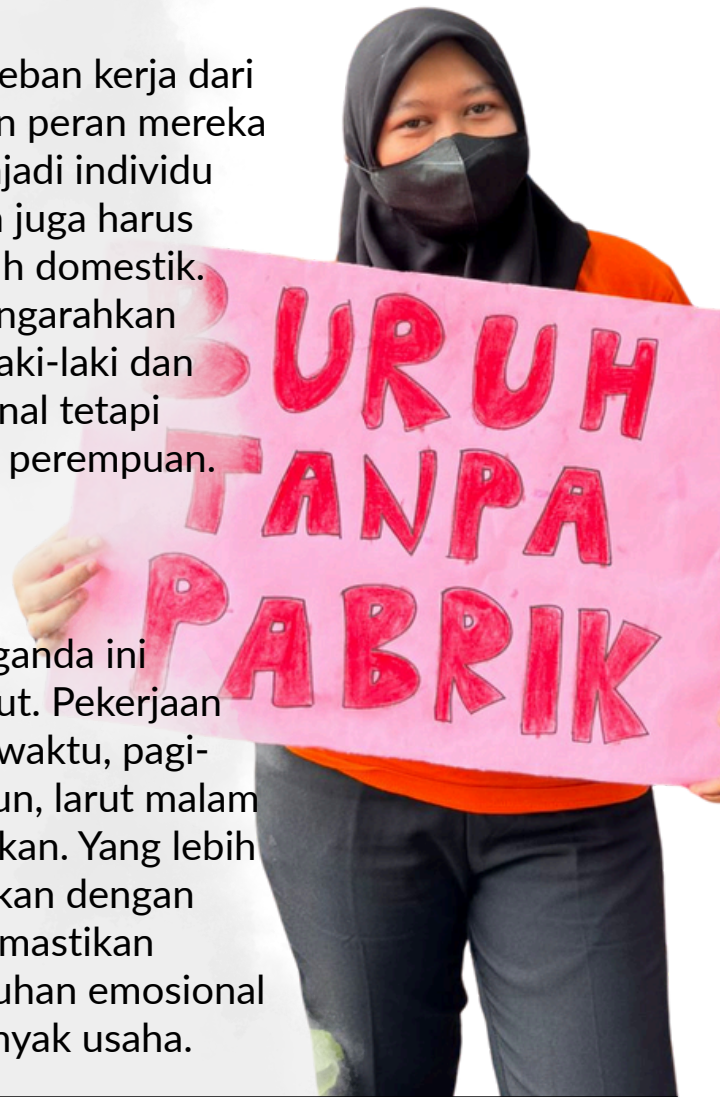
Beban ganda yang diemban oleh perempuan bukan sesuatu yang baru dikenalkan bersamaan dengan hadirnya internet. Sejak lama, pekerjaan laki-laki diasosiasikan dengan upah, produktivitas, dan bernilai ekonomi. Sementara itu, pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dianggap sebagai sesuatu yang natural, bahkan insting alamiah, alih-alih sebagai “pekerjaan” yang juga tidak kalah sulit dari pekerjaan di ranah formal. Lebih jauh, dalam sejarahnya, pekerjaan seperti bertani, beternak, hingga mencari makan di hutan tidak dibebankan di pundak laki-laki semata. Hanya saja, seperti tersahir, sosial menyepakati itu bukanlah bagian dari bekerja, meskipun beban yang dipikul hampir sama.

Masuk ke era industrialisasi, pembagian ini tidak hilang, tetapi malah bertahan dan semakin kokoh. Masuknya perempuan ke pabrik dan kantor tidak mengurangi ekspektasi sosial bahwa mereka tetap menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga tetap bertahan. Di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia, ekspektasi ini telah tertanam kuat dalam norma-norma budaya yang mendefinisikan perempuan sebagai pengasuh dan penopang moral keluarga.

Perubahan yang terjadi tidak mengurangi beban kerja dari perempuan, tetapi perluasan ekspektasi dan peran mereka sebagai perempuan. Selain diharapkan menjadi individu yang produktif secara ekonomi, perempuan juga harus tetap menjalankan peran tradisional di ranah domestik. Sehingga, emansipasi yang terjadi tidak mengarahkan pada pembagian kerja yang merata antara laki-laki dan perempuan di ranah domestik dan profesional tetapi akumulasi beban kerja yang tertumpu pada perempuan.

Ilusi Sihir dari “*Effortlessness*” dan Politik dari Persepsi

Salah satu ciri paling mencolok dari beban ganda ini adalah betapa tak terlihatnya beban tersebut. Pekerjaan rumah tangga sering dilakukan di sela-sela waktu, pagi-pagi sekali sebelum anggota keluarga bangun, larut malam atau akhir pekan, sehingga mudah terlewatkan. Yang lebih penting lagi, pekerjaan ini sering kali dilakukan dengan baik, sehingga menciptakan ilusi bahwa memastikan rumah tetapi bersih dan rapi dengan kebutuhan emosional keluarga terpenuhi tidak membutuhkan banyak usaha.



Di sini, para penyihir modern dapat menyulap waktu 24 jam agar cukup untuk menyajikan makanan diatas meja, memastikan pakaian bersih dan rapi, anak-anak dengan nilai sekolah yang bagus dan berkelakuan baik. Mengelola rumah tangga tidak hanya melibatkan tugas-tugas fisik, tetapi juga beban mental dalam merencanakan, mengingat, dan mengantisipasi kebutuhan keluarga. Semua tugas-tugas tersebut membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan energi emosional. Namun, karena cenderung tidak terlihat dan dianggap lumrah, pekerjaan tersebut jarang diakui sebagai pekerjaan dan menyumbang terciptanya beban ganda.

Ilusi ini juga meluas ke tempat kerja. Di banyak tempat kerja, gambaran pekerja ideal masih secara implisit didefinisikan oleh ketersediaan tanpa henti dan fokus yang tak terbagi. Oleh karena itu, perempuan harus melakukan upaya menyeimbangkan yang rumit. Mereka harus menunjukkan komitmen tanpa terlihat kewalahan, serta kompetensi tanpa menunjukkan kelelahan. Setiap kesulitan yang terlihat berisiko ditafsirkan sebagai kurangnya profesionalisme, bukan sebagai cerminan ketidaksetaraan struktural.

Perempuan yang berhasil mengelola kedua bidang tersebut sering dianggap sekadar “mampu” atau “terorganisir dengan baik,” bukan sebagai individu yang memikul beban yang tidak proporsional. Kemampuan mereka untuk mengatasi situasi menjadi bukti bahwa sistem berfungsi, bukan tanda bahwa sistem tersebut menuntut terlalu banyak. Dalam hal ini, “penyihir modern” tidak hanya mengelola dua set tanggung jawab; ia juga mengelola persepsi. Ia harus memastikan bahwa kerja keras di balik pencapaiannya tetap tersembunyi, bahwa kompleksitas kehidupan sehari-harinya tidak mengganggu citra kompetensi yang tampak mudah. Hanya saja, bahkan sihir pun memiliki batasnya.

Sama seperti kekuatan sihir yang terbatas, energi dan waktu seorang perempuan juga memiliki batas. Upaya terus-menerus untuk menggunakan kekuatan ini secara maksimal dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan burnout. Telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan lebih memiliki lebih sedikit ruang untuk istirahat, melakukan hobi, atau menyisihkan waktu untuk pengembangan diri. Hal ini berdampak tidak hanya pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada perkembangan karir jangka panjang, karena peluang untuk pelatihan, jaringan, dan kemajuan mungkin menjadi terbatas.



Mengevaluasi Struktur yang Rusak, bukan Menuntut Perempuan yang Cakap

Masalah beban ganda yang terus berlanjut seringkali dipandang sebagai soal pilihan pribadi atau kemampuan individu. Para perempuan didorong untuk “menyeimbangkan” tanggung jawab mereka, mengatur waktu dengan lebih efektif, atau mencari dukungan jika memungkinkan. Meskipun strategi semacam itu bisa membantu, hal tersebut tidak menyelesaikan masalah yang mendasarinya.

Masalahnya bukanlah bahwa perempuan gagal mengelola peran mereka, melainkan bahwa struktur kerja, baik yang dibayar maupun tidak dibayar, masih tidak seimbang. Selama pekerjaan rumah tangga secara tidak proporsional dibebankan kepada perempuan, dan selama tempat kerja diatur berdasarkan asumsi yang mengabaikan kenyataan ini, beban tersebut akan terus ada.

Mengatasi hal ini membutuhkan perubahan yang lebih luas. Hal ini melibatkan pengakuan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan, mendorong pembagian tanggung jawab yang lebih adil di dalam rumah tangga, dan meninjau kembali norma-norma tempat kerja untuk memungkinkan fleksibilitas dan inklusivitas yang lebih besar. Hal ini juga membutuhkan intervensi kebijakan, seperti layanan penitipan anak yang terjangkau, cuti orang tua, dan perlindungan bagi pekerja yang memiliki tanggung jawab merawat.

Melampaui Mitos Penyihir Modern

Perempuan membutuhkan kekuatan sihir agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai peran sekaligus memenuhi ekspektasi sosial yang tidak realistis. Bagaimana penyihir pula, perempuan menyembunyikan kerja keras yang menopang rumah tangga dan perekonomian menjadi seolah-olah terlihat mudah dan alamiah.

Namun, pada akhirnya, tujuan seharusnya bukan untuk merayakan bentuk “sihir” ini, melainkan mempertanyakan mengapa hal itu perlu ada sejak awal. Perempuan tidak seharusnya dituntut harus menciptakan jam-jam ekstra dalam sehari untuk memenuhi ekspektasi sebagai seorang yang profesional dan pengurus rumah tangga yang fenomenal. Pekerjaan, baik yang dibayar maupun tidak, harus terlihat, dihargai, dan dibagi secara lebih adil.



Dengan melampaui mitos ini, kita bisa membayangkan ulang sistem yang lebih adil tidak akan bergantung pada usaha yang tak terlihat. Sebaliknya, sistem tersebut akan mengakui bahwa upaya mempertahankan kehidupan, baik dalam bentuk kerjaan yang dibayar maupun tidak, adalah tanggung jawab bersama.

Sampai saat itu, “penyihir modern” akan terus ada. Mereka bukan sebagai tokoh fantasi, melainkan sebagai cerminan realitas saat ini di mana perempuan diharapkan untuk melakukan segalanya dan membuatnya terlihat mudah tanpa makna.

Sunyi di Pinggir Perkebunan: *Potret Buruh Sawit dalam Bayang-Bayang May Day*

Oleh: Umi



Setiap tanggal 1 Mei, ruang publik di kota-kota besar dipenuhi oleh gelombang massa buruh yang menyuarakan tuntutan kesejahteraan. May Day telah menjadi simbol perjuangan kolektif kelas pekerja, sekaligus panggung politik yang mempertemukan buruh, negara, dan publik dalam satu arena. Namun, di balik kemeriahan tersebut, terdapat kelompok buruh yang nyaris tidak tersentuh oleh euforia peringatan itu, **yakni buruh perkebunan kelapa sawit yang bekerja di wilayah-wilayah terpencil.**

Bagi sebagian besar buruh sawit, May Day bukanlah momentum perayaan, melainkan hari kerja yang tetap berjalan seperti biasa. Mereka tetap berada di tengah kebun, menjalankan rutinitas berat dengan risiko tinggi.

Ketimpangan ini menunjukkan adanya jurang representasi dalam gerakan buruh di Indonesia, di mana suara buruh perkebunan masih terpinggirkan dari narasi utama perjuangan ketenagakerjaan nasional.

Invisibilitas dan Ketidakpastian Kerja

Salah satu persoalan utama yang dihadapi buruh sawit adalah status kerja yang tidak pasti. Banyak pekerja di sektor ini masih berstatus buruh harian lepas (BHL), bahkan setelah bekerja bertahun-tahun. Status tersebut membuat mereka tidak memiliki jaminan kerja maupun akses terhadap hak-hak dasar seperti jamkes, tunjangan, dan perlindungan sosial (RRI, 2023).



Laporan berbagai organisasi buruh menunjukkan bahwa kondisi ini bukanlah kasus yang terisolasi. Dalam banyak perkebunan, sistem kerja fleksibel digunakan untuk menekan biaya produksi, dengan konsekuensi langsung pada kerentanan buruh. Buruh menjadi mudah digantikan, tidak memiliki kepastian pendapatan, dan sulit menuntut hak karena posisi tawar yang lemah (Sawitku.id, 2023).

Risiko Kesehatan dan Bahaya Kerja

Risiko kesehatan menjadi persoalan serius dalam sektor perkebunan sawit. Paparan bahan kimia seperti pestisida dan herbisida merupakan ancaman utama, terutama bagi buruh yang bekerja di bagian penyemprotan dan pemupukan (Kompas.com, 2008). Penelitian lapangan menemukan bahwa seluruh buruh mengalami berbagai gangguan kesehatan, mulai dari iritasi kulit, muntah darah, sakit dada, gangguan pernapasan, hingga gangguan penglihatan (Koalisi Buruh Sawit et al., 2025). Bahkan, sebagian buruh mengalami hidung berdarah dan gejala penyakit yang berulang akibat paparan bahan kimia.

Meskipun risiko tersebut tinggi, tidak semua perusahaan menyediakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi pekerja, termasuk bagi mereka yang secara langsung terpapar bahan kimia (Koalisi Buruh Sawit et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan lemahnya implementasi prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Kasus di Riau juga menunjukkan dampak ekstrem dari kondisi ini, di mana buruh mengalami kebutaan dan gangguan kesehatan serius akibat paparan racun rumput tanpa adanya tanggung jawab perusahaan dalam pembiayaan pengobatan (Kompas.com, 2022).

Ketidakadilan Upah dan Eksploitasi Terselubung

Selain persoalan kesehatan dan keselamatan, buruh sawit juga menghadapi ketidakadilan dalam sistem pengupahan. Banyak laporan menunjukkan bahwa upah yang diterima buruh tidak sebanding dengan beban kerja yang mereka tanggung. Bahkan, dalam beberapa kasus, buruh menerima upah di bawah standar minimum. Koalisi buruh sawit juga menyoroti adanya praktik diskriminasi, terutama terhadap buruh perempuan, yang sering kali menerima upah lebih rendah meskipun melakukan pekerjaan yang setara dengan buruh laki-laki (FNV, 2022). Hak-hak dasar seperti cuti haid dan cuti melahirkan kerap tidak diberikan, terutama bagi pekerja dengan status tidak tetap.

Eksploitasi ini sering kali bersifat terselubung, karena tidak selalu tercatat secara resmi dalam sistem ketenagakerjaan. Buruh dipaksa memenuhi target kerja tinggi dengan sistem upah berbasis hasil, yang pada akhirnya mendorong mereka bekerja melebihi kapasitas fisik tanpa kompensasi yang layak



Konflik Agraria dan Kerentanan Struktural

Kondisi buruh sawit tidak dapat dilepaskan dari persoalan agraria yang lebih luas. Banyak buruh yang bekerja di perkebunan merupakan mantan petani yang kehilangan akses terhadap tanah akibat ekspansi perusahaan. Ketika tanah sebagai alat produksi utama hilang, mereka tidak memiliki pilihan selain menjadi buruh di lahan yang sebelumnya mereka miliki atau kelola. Situasi ini menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap perusahaan. Tanpa alternatif sumber penghidupan, buruh sulit menolak kondisi kerja yang tidak adil. Bahkan, dalam beberapa kasus, upaya untuk mempertahankan hak atas tanah dapat berujung pada konflik dengan perusahaan atau aparat.

Laporan lembaga independen menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk praktik kerja paksa dan kondisi kerja yang tidak layak di sejumlah perkebunan (RRI, 2023; TKP Pontianak, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan buruh sawit tidak hanya berkaitan dengan ketenagakerjaan, tetapi juga menyangkut isu keadilan sosial dan hak atas sumber daya. Eksploitasi ini sering kali bersifat terselubung, karena tidak selalu tercatat secara resmi dalam sistem ketenagakerjaan. Buruh dipaksa memenuhi target kerja tinggi dengan sistem upah berbasis hasil, yang pada akhirnya mendorong mereka bekerja melebihi kapasitas fisik tanpa kompensasi yang layak.

May Day dan Buruh Sawit: Kesenjangan yang Harus Dijembatani

Dalam konteks ini, May Day seharusnya menjadi momentum refleksi yang lebih inklusif. Perayaan yang selama ini terpusat di kota perlu diperluas untuk mencakup realitas buruh di wilayah pedesaan dan perkebunan. Tanpa upaya tersebut, May Day berisiko menjadi simbol yang eksklusif yang hanya merepresentasikan sebagian kecil dari kelas pekerja.

Buruh sawit menghadapi tantangan yang berbeda dan lebih mendasar dibandingkan dengan buruh di sektor formal. Mereka tidak hanya berjuang untuk kesejahteraan, tetapi juga untuk perlindungan dasar, pengakuan, dan keamanan dalam bekerja. Oleh karena itu, penguatan solidaritas lintas sektor menjadi sangat penting. Gerakan buruh perlu menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan, sekaligus mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi buruh perkebunan. Tanpa langkah tersebut, kesenjangan antara buruh kota dan buruh desa akan terus melebar.



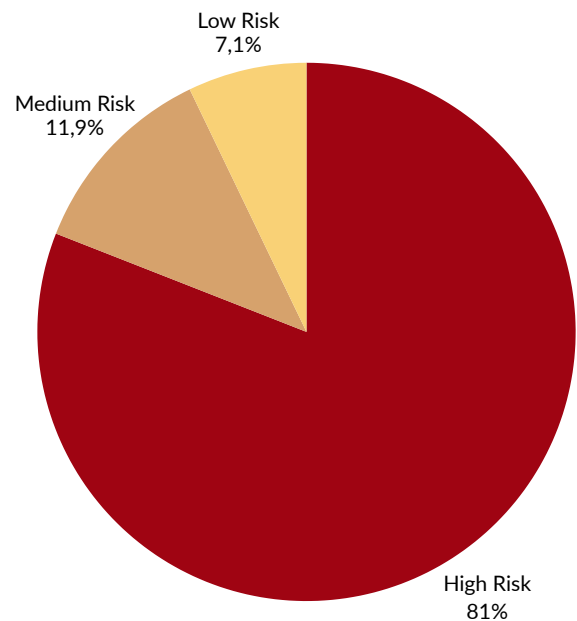
Penutup

Kesunyian di pinggir perkebunan adalah realitas yang tidak boleh diabaikan. Di balik setiap produk sawit yang beredar di pasar, terdapat kerja keras buruh yang menghadapi risiko kesehatan, ketidakpastian kerja, dan ketidakadilan struktural. May Day seharusnya menjadi pengingat bahwa perjuangan buruh tidak hanya terjadi di jalanan kota, **tetapi juga di ladang-ladang yang jauh dari sorotan**. Mengakhiri kesunyian ini membutuhkan keberanian untuk mengakui dan mengangkat suara buruh sawit ke dalam panggung nasional. Hanya dengan demikian, peringatan May Day dapat benar-benar mencerminkan **solidaritas yang utuh** tidak hanya bagi mereka yang terlihat, tetapi juga bagi mereka yang selama ini tersembunyi di balik rimbunnya perkebunan.

Tren Kasus Ketenagakerjaan yang Ditangani TURC

Oleh: Anya

Distribusi tingkat risiko kasus menunjukkan bahwa sebagian besar pengaduan berada dalam kategori risiko tinggi, dengan proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan risiko menengah dan rendah. Komposisi ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya kebutuhan terhadap mekanisme intervensi yang tidak hanya berorientasi pada pencatatan kasus, tetapi juga pada pengelolaan potensi dampak hubungan industrial yang lebih kompleks.



Dalam konteks ini, keberadaan lembaga pendamping seperti TURC dapat dipahami sebagai aktor yang berkontribusi dalam memastikan bahwa kasus dengan potensi dampak serius mendapatkan perhatian yang memadai melalui pendekatan yang terukur dan berbasis klarifikasi fakta.

Kasus yang dapat dikategorikan sebagai risiko tinggi secara implisit merujuk pada permasalahan yang berpotensi mempengaruhi keberlangsungan hubungan kerja atau hak fundamental pekerja, seperti dugaan pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai prosedur, tuduhan diskriminasi, atau indikasi perlakuan tidak adil yang berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial.

Dalam situasi seperti ini, proses pendampingan secara tidak langsung menunjukkan peran dalam membantu pekerja memahami posisi kasusnya, kemungkinan opsi penyelesaian, serta pentingnya pendekatan berbasis bukti untuk menghindari eskalasi konflik yang tidak produktif.

Sementara itu, kasus dengan risiko menengah dapat dipahami sebagai permasalahan yang berdampak pada kondisi kerja sehari-hari tetapi masih memiliki ruang penyelesaian melalui klarifikasi administratif atau perbaikan prosedural. Contoh implisit dari kategori ini dapat berupa ketidaksesuaian pencatatan kehadiran, keterlambatan akses terhadap manfaat pekerja, atau ketidakjelasan informasi terkait komponen upah.

Dalam konteks ini, intervensi yang dilakukan secara tidak langsung mencerminkan peran dalam memperkuat literasi prosedural pekerja sekaligus membantu memastikan bahwa permasalahan diselesaikan melalui jalur komunikasi yang tepat.

Adapun kasus risiko rendah cenderung berkaitan dengan isu yang bersifat operasional atau memerlukan penjelasan tambahan tanpa indikasi pelanggaran serius, seperti miskomunikasi terkait kebijakan internal, kebutuhan klarifikasi mengenai prosedur administratif, atau permintaan informasi terkait fasilitas kerja. Penanganan kasus seperti ini secara implisit menunjukkan adanya fungsi edukasi preventif, di mana pekerja memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai sistem yang berlaku sehingga potensi kesalahpahaman serupa dapat diminimalkan di masa depan.

Secara keseluruhan, distribusi tingkat risiko ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa keterlibatan TURC tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus yang telah terjadi, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk proses pembelajaran bagi pekerja serta memperkuat kualitas interaksi antara pekerja dan manajemen.

Peran tersebut tercermin dari bagaimana kasus dengan berbagai tingkat risiko ditangani melalui kombinasi klarifikasi, pendampingan, serta penguatan pemahaman pekerja terhadap mekanisme hubungan industrial. Dengan demikian, kontribusi TURC dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat akses terhadap mekanisme pengaduan yang kredibel sekaligus mendorong terciptanya penyelesaian yang lebih konstruktif dan berkelanjutan.



Refleksi Kritis: *May Day* — *Perlawanan, Ritual, atau Banding?*

Oleh: *Emelia Yanti Siahaan, Sekjen DPP GSB*



Setiap tanggal 1 Mei, jalanan kembali dipenuhi spanduk, teriakan, dan barisan massa buruh. Lagu-lagu perjuangan diputar, orasi-orasi dilontarkan, dan tuntutan-tuntutan kembali dikumandangkan. Tapi di tengah semua itu, ada satu pertanyaan yang pelan-pelan menggema: apakah *May Day* masih menjadi hari perlawanan, atau sudah berubah menjadi sekadar ritual tahunan—atau bahkan lebih jauh, menjadi “banding” simbolik yang tak pernah benar-benar dimenangkan?

Sejarah mencatat *May Day* lahir dari darah dan api. Ia bukan “hadiah” dari penguasa, atau pemodal. Ia adalah hasil dari perlawanan keras dan heroik kelas buruh terhadap sistem yang menindas dan menghisap—terutama perjuangan untuk jam kerja delapan jam. Di masa itu, kaum buruh tidak sekadar turun ke jalan untuk “menyuarakan tuntutan”; **mereka bertaruh nyawa**. Negara dan kapital berdiri sebagai musuh yang nyata, bukan mitra dialog.

Namun hari ini, kita hidup dalam lanskap yang berbeda. Negara tidak lagi selalu tampil dengan wajah represif yang kasar—ia sering memakai topeng dialog, regulasi, bahkan “kemitraan sosial”. Kapital pun semakin licin, bergerak dalam jaringan global yang sulit disentuh. Dalam kondisi seperti ini, bentuk perlawanan pun berubah. Tapi perubahan ini membawa dilema: apakah kita sedang beradaptasi secara taktis, atau justru terjebak dalam domestikasi gerakan?

May Day di banyak tempat kini tampak seperti agenda yang sudah dijadwalkan rapi. Ada titik kumpul, ada panggung, ada susunan acara. Bahkan kadang ada sponsor. Di satu sisi, ini menunjukkan organisasi yang lebih matang. Tapi di sisi lain, ada risiko besar: perlawanan kehilangan daya kejutnya. Ia menjadi dapat diprediksi, bahkan mungkin sudah diantisipasi oleh pihak yang seharusnya ditantang.

Di titik ini, *May Day* bisa tergelincir menjadi ritual. Ia dilakukan karena “memang setiap tahun begitu”. Tuntutan yang dibawa pun sering berulang—penting, iya, tapi tidak selalu berkembang sesuai dengan perubahan situasi objektif. Kita meneriakkan hal yang sama dan hampir di tempat yang sama, dengan format yang sama. Sementara di luar sana, sistem yang kita lawan terus berevolusi.

Lebih jauh lagi, ada kecenderungan *May Day* berubah menjadi semacam “banding”. Kita seperti sedang mengajukan permohonan berulang kepada negara: tolong dengar tuntutan kami, tolong perbaiki kebijakan, tolong lindungi buruh. Ini bukan hal yang sepenuhnya salah—karena dalam sistem hukum dan politik yang ada, ruang advokasi memang penting. Tapi persoalannya, jika seluruh energi perlawanan direduksi menjadi permohonan kepada kekuasaan, maka kita kehilangan posisi sebagai subjek yang berdaulat.

Banding, dalam logika hukum, diajukan kepada otoritas yang lebih tinggi dengan harapan keputusan sebelumnya diperbaiki. Tapi bagaimana jika “otoritas” itu sendiri adalah bagian dari masalah? Bagaimana jika struktur yang ada memang dirancang untuk mempertahankan ketimpangan? Di titik ini, banding bisa menjadi ilusi—memberi harapan tanpa benar-benar mengubah fondasi.

Ini bukan berarti kita harus menolak semua bentuk advokasi atau dialog. Tapi kita perlu jujur: perlawanan tidak bisa hanya bergantung pada pengakuan dari atas. Ia harus dibangun dari bawah, dari kekuatan kolektif yang nyata. *May Day* seharusnya menjadi momen konsolidasi, bukan sekadar ekspresi. Ia harus memperkuat organisasi, memperdalam kesadaran kelas, dan memperluas solidaritas lintas sektor.

Di tengah fragmentasi dunia kerja—dari buruh pabrik, buruh tambang, buruh kebun, pekerja informal, hingga pekerja platform digital—tantangan gerakan buruh semakin kompleks. Jika May Day hanya menjadi panggung bagi sebagian kelompok, maka ia kehilangan relevansinya. Tapi jika ia mampu menjadi ruang pertemuan berbagai bentuk kerja dan eksploitasi, maka ia bisa kembali menjadi kekuatan yang hidup.

Ada juga pertanyaan tentang keberanian. Perlawanan sejati selalu mengandung risiko. Jika May Day terlalu “aman”, terlalu “terkendali”, kita perlu bertanya: siapa yang diuntungkan dari kondisi ini? Apakah kita sedang melindungi diri, atau tanpa sadar sedang membatasi potensi gerakan kita sendiri?

Namun refleksi ini tidak boleh berakhir dalam sinisme. Mengatakan bahwa May Day telah menjadi ritual bukan berarti kita harus meninggalkannya. Justru sebaliknya: kita perlu merebut kembali maknanya. Ritual bisa menjadi kosong, tapi juga bisa menjadi sumber kekuatan jika diisi dengan kesadaran maju dan strategi yang tepat.

May Day harus kembali menjadi ruang untuk membayangkan kemungkinan yang lebih radikal. Bukan hanya menuntut perbaikan kecil, tapi mempertanyakan struktur besar. Bukan hanya bereaksi terhadap kebijakan, tapi juga merumuskan visi alternatif tentang dunia kerja dan kehidupan yang lebih adil.

Dan mungkin, di sinilah kuncinya: perlawanan bukan soal seberapa keras kita berteriak satu hari dalam setahun, tapi seberapa konsisten kita membangun kekuatan sepanjang tahun. May Day hanyalah puncak gunung es. Tanpa kerja organisasi yang terus-menerus, ia hanya menjadi seremoni semata.

Jadi, apakah May Day hari ini adalah perlawanan ritual, atau banding? Jawabannya mungkin: bisa keduanya. Tapi itu bukan takdir yang tidak bisa diubah. Itu adalah hasil dari pilihan-pilihan kolektif tentang bagaimana kita memaknai, mengorganisir, dan mengarahkan gerakan.

Kalau May Day hanya jadi rutinitas, maka ia akan perlahan kehilangan nyawanya. Tapi kalau kita isi dengan keberanian, strategi, dan solidaritas yang nyata, maka ia akan tetap menjadi api—yang mungkin tidak selalu terlihat besar, tapi cukup untuk terus menyala, dan suatu hari, membakar habis ketidakadilan yang kita hadapi.

Singkatnya: May Day bukan soal tradisi. Ia soal posisi. Mau berdiri sebagai penggugat yang sopan, atau sebagai kekuatan yang benar-benar menantang? Pilihannya ada pada kita (kaum buruh).



Kalau kita tarik napas lebih dalam—lebih panjang dari sekadar orasi satu hari—May Day seharusnya bukan cuma soal hadir di jalan, tapi soal ingat dari mana kita berasal. Hari ini lahir dari jejak panjang perjuangan kelas buruh ratusan tahun lalu: dari pabrik-pabrik gelap, dari tubuh-tubuh yang diperas tanpa batas, dari keberanian untuk bilang “cukup” ketika dunia memaksa mereka diam. Itu bukan cerita nostalgia. Itu fondasi.

Masalahnya, ingatan kolektif itu mulai terkikis. May Day sering dipahami sebagai agenda, bukan sejarah. Padahal tanpa memahami akar historisnya, kita mudah kehilangan arah—perlawanan jadi dangkal, tuntutan jadi repetitif, dan strategi jadi tumpul. Kelas buruh perlu merebut kembali kesadaran itu: bahwa setiap hak yang hari ini dianggap “normal” adalah hasil pertarungan hidup-mati generasi sebelumnya. Tidak ada yang diberikan cuma-cuma. Semuanya direbut.

Dan kalau kita jujur—jujur tanpa basa-basi—kondisi buruh hari ini tidak sejauh itu berbeda dari masa lalu. Bentuknya mungkin berubah, tapi logikanya sama: eksploitasi tetap jadi mesin utama. Jam kerja yang panjang masih jadi kenyataan, hanya saja kini dibungkus dengan istilah “fleksibilitas” atau “target produktivitas”. Upah masih dipotong, ditekan, atau dibekukan dengan berbagai dalih efisiensi. Kebijakan negara sering kali lebih cepat melindungi investasi daripada melindungi manusia yang bekerja di dalamnya.

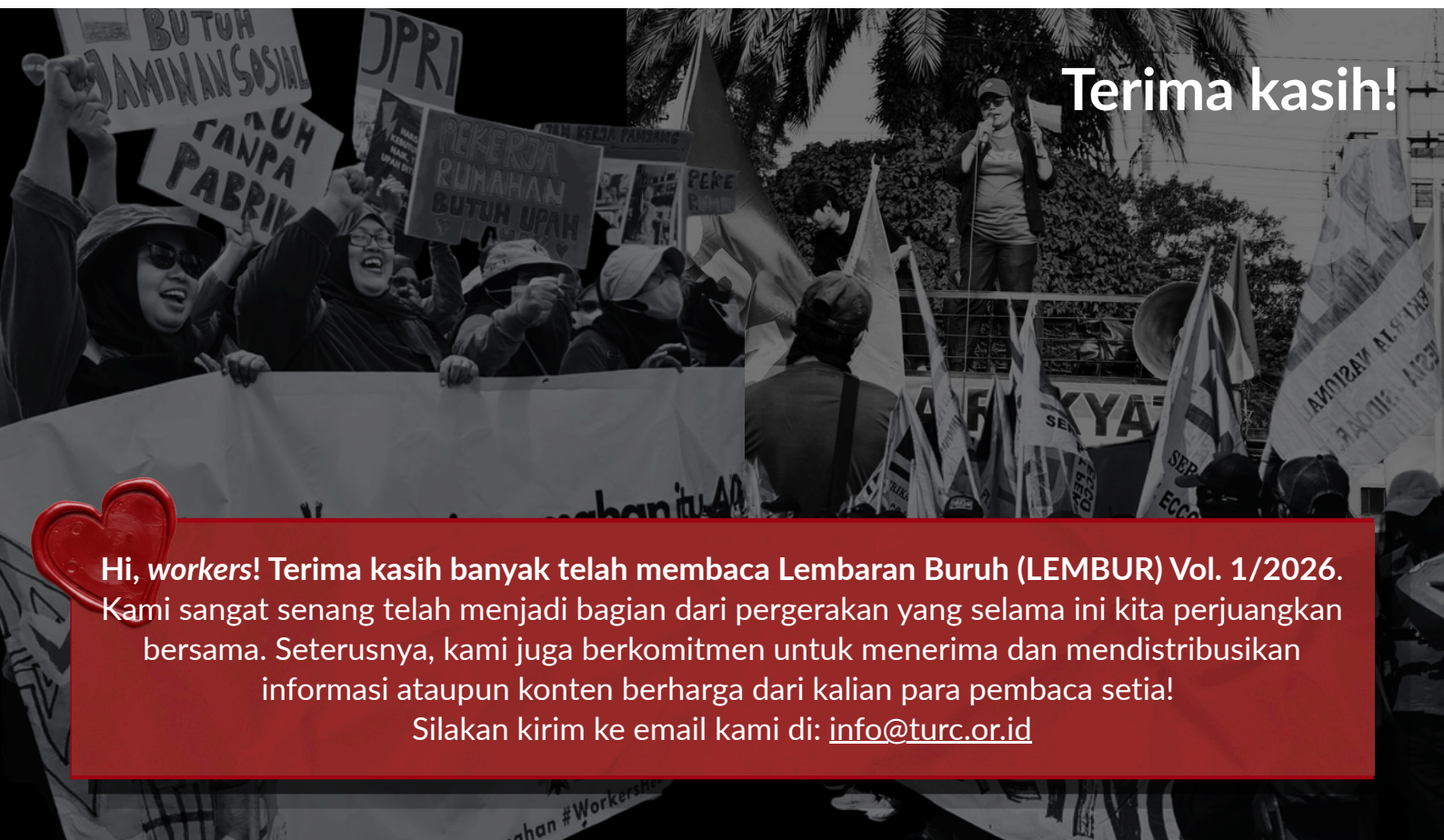
Seolah-olah kita sedang melihat sejarah yang berulang, tapi dengan kostum yang berbeda. Dulu rantainya terlihat jelas, sekarang disamarkan oleh aplikasi, algoritma, dan jargon manajemen. Dulu penghisapan dilakukan secara terang-terangan, sekarang dibungkus dengan narasi “kemitraan” dan “kesempatan”. Tapi pada akhirnya, satu hal tetap konstan: nilai lebih terus diambil dari kerja buruh, sementara kesejahteraan yang dijanjikan selalu ditunda.

Di titik ini, May Day harus kembali menjadi cermin. Cermin yang memaksa kita melihat kenyataan tanpa ilusi. Bahwa perjuangan belum selesai. Bahwa kemenangan-kemenangan masa lalu tidak otomatis menjamin keadilan hari ini. Bahwa tanpa kesadaran kelas yang kuat, kita mudah ditarik kembali ke posisi yang sama—atau bahkan lebih buruk.

Maka kelas buruh harus kembali belajar dari sejarahnya sendiri. Bukan untuk romantisasi, tapi untuk strategi. Untuk memahami bahwa kekuatan sejati tidak datang dari belas kasihan negara atau kapital, tapi dari organisasi, solidaritas, dan keberanian kolektif. May Day harus kembali diisi dengan semangat itu—semangat yang tidak hanya menuntut, tapi juga membangun kekuatan.

Karena pada akhirnya, pertanyaan tentang May Day—apakah ia ritual atau perlawanan—akan selalu kembali ke satu hal: seberapa dalam kita memahami siapa kita sebagai kelas buruh. Kalau kesadaran itu tajam, maka May Day akan hidup. Tapi kalau ia tumpul, maka sekeras apa pun teriakan kita, ia hanya akan jadi gema yang hilang di antara gedung-gedung kekuasaan.

Dan sejarah tidak pernah berpihak pada mereka yang lupa.



Terima kasih!

Hi, workers! Terima kasih banyak telah membaca Lembaran Buruh (LEMBUR) Vol. 1/2026. Kami sangat senang telah menjadi bagian dari pergerakan yang selama ini kita perjuangkan bersama. Seterusnya, kami juga berkomitmen untuk menerima dan mendistribusikan informasi ataupun konten berharga dari kalian para pembaca setia!

Silakan kirim ke email kami di: info@turc.or.id